

## Rehabilitasi Lahan Kritis Tak Terkontrol

Lahan kritis di wilayah Banjarnegara Jawa Tengah hingga September 2011 lalu telah mencapai luasan 53.324 hektare. Dataran tinggi Dieng termasuk di antaranya. Dinas terkait mencatat, kerusakan hutan lindung di wilayah Dieng dan sekitarnya berkisar 12.364,84 hektare, itu pun belum termasuk jumlah hutan rakyat yang juga kritis.

Data acuan dari Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Opak dan Progo menyebutkan, kondisi kritis di Banjarnegara sebagian besar masih berada di luar kawasan hutan lindung seperti perkebunan, ladang serta hutan yang dikelola rakyat. Masalahnya, daerah tersebut bukan hanya berfungsi sebagai wilayah tangkapan air namun juga zona rawan tanah bergerak.

Kritisnya puluhan ribu lahan ini berdampak langsung pada kekeringan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu serta memberikan ancaman tanah bergerak atau longsor yang lebih besar pada musim hujan mendatang.

"Kurang lebih 70 persen wilayah Banjarnegara yang dinyatakan rawan tanah bergerak dan longsor untuk periode penghujan kali ini. Tren dari tahun ke tahun pun selalu naik. Seperti tahun 2010 kemarin tercatat mendekati 250 kali longsor," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara Aris Sudaryanto, Senin (31/10).

Dia menambahkan, dari total 19 kecamatan di Banjarnegara, yang masuk dalam zona rawan tanah bergerak mencapai 14 kecamatan. Beberapa di antaranya bahkan rawan tiga bencana sekaligus seperti banjir, kekeringan, dan longsor.

Menurut Kepala BPDB, luasnya cakupan zona rawan longsor dan tanah bergerak juga masuk hingga kawasan hutan lindung terutama di lereng yang kritis. Kerugiannya, selain tidak produktif dan sulit merehabilitasinya, lereng dengan kondisi tanah yang kritis sangat mudah retak dengan kedalaman yang tidak dapat diprediksi.

Air hujan yang masuk ke retakan tersebut akan mengelupas struktur tanah di bagian dalam yang pada akhirnya memperbesar kemungkinan dan dampak longsor.

Upaya penanganan melalui rehabilitasi kawasan hutan baik lindung ataupun hutan rakyat sebenarnya sudah diterapkan oleh pemerintah setempat beserta organisasi masyarakat lainnya. Namun, menurut pengakuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banjarnegara, upaya tersebut sangat minim koordinasi sehingga tidak efektif dan gagal mencapai target.

Sebagai contoh di dataran tinggi Dieng. Target realisasi rehabilitasi hutan lindung di wilayah tersebut pada 2011 ini mencapai 360 hektare meliputi 12 desa di empat kecamatan. Program tersebut menggunakan puluhan ribu tanaman kayu keras seperti albasia, pinus dan eucalyptus karena sifat akarnya yang mengikat struktur tanah.

Sayangnya, langkah rehabilitasi yang dilakukan sejumlah dinas seperti pertanian serta kalangan swasta dan LSM kurang terencana atau hanya sebatas usaha penanamannya. Tidak hanya mengabaikan faktor musim, rehabilitasi juga tidak disertai perencanaan berdasarkan skala prioritas.

"Selain terbatasnya anggaran rehabilitasi lahan hutan, urusan perawatan langsung diserahkan kepada masyarakat sekitar bersamaan dengan musim kemarau. Itu pun tidak diikuti dengan evaluasi atau pengawasan. Akibatnya, banyak tanaman yang mati," kata Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Banjarnegara, Sutrisno.